
**UPAYA PEMERINTAH KAMPUNG TERHADAP PEMBINAAN MASYARAKAT
DI KAMPUNG KALI SEMEN DISTRIK NABIRE BARAT KABUPATEN NABIRE**

Wintina Wonda

(Email :)

Petrus Izaach Suripatty

(Email : suripattyp@gmail.com)

Aris Widodo

(Email : aris.chips@gmail.com)

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Satya Wiyata Mandala

ABSTRAK

Dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman, terutama dalam era Globalisasi dimana baik pihak pemerintah maupun swasta harus memiliki peranan dan saling berkerjasama, namun campur tangan pemerintah tentunya menjadi prioritas baik pemerintah pusat hingga pemerintah daerah

Bentuk perhatian pemerintah terfokus ke pemerintah daerah dimana dalam dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan bentuk konsistensi menuju pemerinthan daerah yang baik dan efektif dalam terciptanya penyelenggara pemerintah daerah yang bertanggung jawab

Adapun Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu :

1. Untuk mengetahui sejauhmana pihak pemerintah Kampung dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat di Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire
2. Untuk mengetahui kendala apa yang ditemui oleh pihak pemerintah Kampung dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat di Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire
3. Untuk mengetahui upaya dilakukan pihak pemerintah Kampung dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat di Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire

Keyword : *Pemerintah Kampung dan Pembinaan Masyarakat*

PENGANTAR

Dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 mengatakan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat maka upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan memberikan pembinaan kepada masyarakat agar dapat berkembang dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan

Pembinaan dilakukan oleh pihak pemerintah kampung kepada masyarakat bertujuan untuk memandirikan dan membentuk akhlak serta kemampuan dalam berkomunikasi dengan masyarakat secara social karena Pembinaan berarti pembaharuan atau usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. (Gauzali Syadam 2000:408)

Adapun bentuk pembinaan yang diberikan oleh pihak pemerintah kampung Kalisemen, dimana penulis menfokuskan pada 1. Bidang ekonomi yaitu pembinaan kepada masyarakat terhadap bidang kewirausahaan, 2. Bidang social yaitu pembinaan yang diarahkan kepada nilai social yang dimiliki masyarakat dalam hidup bermasyarakat dan 3. Bidang agama yaitu peminanan untuk dapat saling hidup rukun saling bertoleransi dalam sisa keagamaan

Namun dalam pengamatan yang peneliti lakukan di kampung Kalisemen dimana penulis melihat terdapat masalah sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Kampung terhadap kegiatan – kegiatan di Kampung belum maksimal dilaksanakan
2. Minimnya sosialisasi dan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat dalam membina kesejahteraannya

3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pemerintah Kampung dalam bidang ekonomi dan sosial

Penulis merumuskan masalah dalam penulisan ini yaitu :

1. Sejauhmana pihak pemerintah Kampung dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat di Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire ?
2. Kendala apa yang ditemui oleh pihak pemerintah Kampung dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat di Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire ?
3. Upaya dilakukan pihak pemerintah Kampung dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat di Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire ?

LANDASAN TEORITIS

A. Upaya Pemerintah Kampung

Menurut Adisasmita (2006 : 38) aparatur pemerintah desa sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi di dalam masyarakat maupun perubahan social kemasyarakatan. Untuk itu pemerintah desa selaku kepala pemerintahan dalam usaha mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut harus memiliki kemampuan untuk berpikir atau berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Pemerintah Desa mempunyai peranan yang lebih penting terhadap kemajuan dan perkembangan desa dalam meningkatkan pembangunan desa. dapat dijabarkan sebagai berikut (Mondong Hendra, 2011 : 8)

Menurut Widjaja (2004:20) yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah kepala desa dan perangkat desa sementara BPD adalah badan perwakilan desa yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Bayu Suryaningrat (1980 : 1) menjelaskan perbedaan istilah pemerintah dan pemerintahan sebagai berikut istilah pemerintahan menunjuk pada organ atau alat perlengkapan yang menjalankan fungsi atau bidang tugas, pekerjaan itu. Dapat dikatakan bahwa pemerintahan menunjuk pada objek sedangkan istilah pemerintah menunjuk pada subjek. Kata pemerintah mempunyai arti sempit dan arti luas, pemerintah dalam arti sempit menurut hukum tata Negara positif di Indonesia sekarang ini (menurut UUD 1945) adalah presiden atau dalam bidang eksekutif saja. Sedangkan dalam arti luas, meliputi kekuasaan seperti Trias Politica atau Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.

Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggara pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Widjaja, 2003 : 3).

Menurut Munir (2010 : 19) peran pemerintah sesuai dengan fungsinya yaitu :

- a. Entrepreneur, artinya pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan usaha dalam mengelola sumber daya ekonomi, mengelola aset-aset daerah sumber daya ekonomi potensial, sehingga secara ekonomi menguntungkan dan member manfaat bagi masyarakat.
- b. Koordinator, Sebagai koordinator pemerintah daerah dapat menetapkan kebijaksanaan atau strategi bagi pembangunan daerah dan merangkul semua komponen masyarakat untuk menjadi aktor dalam pembangunan.
- c. Fasilitator, sebagai fasilitator pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudional, yaitu berkaitan dengan perbaikan prosedur perijinan dan pelayanan, serta melakukan penetapan daerah untuk memantapkan pengaturan dimensi spasial dalam pembangunan.

Menurut Siagian (1979 : 101) mengklasifikasikan peran dan fungsi pemerintah sebagai berikut :

- a. Fungsi pemeliharaan ketertiban dan ketenangan (Maintenance of peace and order)
Fungsi ini merupakan fungsi yang sangat penting oleh karena ketertiban dan

- ketenangan dalam pembangunan tidak akan ada apabila pemerintah tidak berhasil dalam melakukan fungsi ini. Gangguan tersebut dapat terjadi dari mana saja.
- b. Fungsi pertahanan dan keamanan. Fungsi ini merupakan fungsi terpenting pula dari pemerintah karena tidak jarang terlihat adanya keinginan dari pihak-pihak tertentu untuk mendominasi pihak lain dengan tujuan agar pihak lain itu dapat dipergunakan sebagai alat untuk meningkatkan kemakmuran pihak-pihak yang lebih kuat.
 - c. Fungsi Perpajakan. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi pemerintah yang pertama timbul di Negara politik, tujuannya adalah bahwa untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pemerintah, pemerintah selalu membutuhkan biaya dan biaya itu secara tradisional bersumber dari pajak.
 - d. Fungsi Hukum. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk mengatur tata benegara dan tata bermasyarakat agar konflik-konflik yang terjadi dalam pembangunan dapat diselesaikan menurut kriteria yang telah diakui dan diterima oleh masyarakat, karena mereka penguasa dan masyarakat akan berkedudukan sama dimata hukum.
 - e. Fungsi Administratif. Dalam fungsi ini pemerintah harus bekerja demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat dan bukan untuk kepentingan sekelompok orang yang dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus berusaha melalui pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawabnya meningkatkan taraf hidup orang banyak dalam pembangunan tersebut.

B. Pembinaan Masyarakat

Menurut Arnstein (1969) peran masyarakat adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam perubahan sosial yang memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan dari kelompok yang berpengaruh. Sedangkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan telah tercantum secara konstitusional dalam peraturan perundangan (Hardjosoemantri, 1986: 27).

Menurut Champates (2006), pembinaan adalah hal penting untuk meningkatkan kinerja. Lewat pembinaan akan terjalin komunikasi dua arah antara manajer dengan karyawan sehingga manajer dapat mengidentifikasi apa yang harus ditingkatkan dan

bagaimana cara meningkatkan. Sejalan dengan itu Toit (2007) menyatakan bahwa pembinaan berbicara tentang keyakinan seseorang dan perilaku yang menghambat kinerja. Melalui pembinaan inilah manajer mampu melihat tingkat keyakinan seseorang dalam bekerja dan perilaku apa saja yang dapat menghambat kinerja sehingga dapat memberikan jalan keluar

Menurut Thoha (1993) mengatakan bahwa pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Pembinaan menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, perubahan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Sedangkan menurut Handoko (2001), pembinaan (*coaching*) merupakan upaya berharga untuk membantu orang lain mencapai kinerja puncak.

Menurut Minor (2003) mengatakan bahwa “membina adalah proses mengarahkan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk melatih dan memberikan orientasi kepada seorang karyawan tentang realitas di tempat kerja dan membantunya mengatasi hambatan dalam mencapai prestasi optimum”. Hal dimaksud erat kaitannya dengan kata membina yang diartikan sebagai “membimbing (*counselling*)”, yaitu proses pemberian dukungan oleh pembina untuk membantu seorang pegawai mengatasi masalah akibat perubahan organisasi yang berdampak pada prestasi kerja. Secara implisit, pembinaan dilakukan secara terencana, sistematis dan terintegrasi

Pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik sebagaimana dijelaskan dalam Thoha (1993 : 7) dalam buku yang berjudul “Pembinaan Organisasi”. Pembinaan menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, perubahan, evolusi, atas berbagai kemungkinan berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Pengertian diatas menggandung dua hal, yaitu pertama, bahwa pembinaan itu sendiri bisa berupa tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan; dan kedua, pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.

Menurut Indra Bastian, (2006) pembinaan dalam konteks otonomi daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk memfasilitasi proses penyelenggaraan otonomi. Fasilitasi yang dimaksud disini adalah pemberdayaan

daerah otonom melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Winarno Surachmad (1998:8) jenis penelitian deskriptif adalah membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan jalan mengklasifikasikan, menganalisa dan menginterpretasikan

B. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian yaitu berlokasi di Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Hadari Nawawi (1991 : 144) populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, nilai gejala dan peristiwa sebagai sumber daya yang dimiliki karakteristik tertentu.

Jadi populasi merupakan jumlah keseluruhan dari analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Dengan demikian dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah berjumlah 4.106 orang yang terdiri :

1. Jumlah Aparat Kampungsebanyak = 6 orang
2. Jumlah Penduduk Kampungsebanyak = 4.106 orang

2. Sampel

Sampel adalah merupakan sebagian dari jumlah keseluruhan objek dari populasi yang akan diwakili untuk dipilih dalam penelitian menurut Hadari Nawawi (1991 : 146).

Teknik penarikan sampel yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Menurut Sugiono (1998 : 62) adalah teknik penentuan sampel

untuk tujuan tertentu saja yaitu yang memahami tentang keadaan Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire.

Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagian dari jumlah populasi yaitu sebanyak 53 orang, yang terdiri dari :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Aparat Kampung | : 6 orang |
| 2. Tokoh Agama | : 5 orang |
| 3. Tokoh Pemuda | : 5 orang |
| 4. Tokoh Perempuan | : 3 orang |
| 5. Tokoh Adat | : 4 orang |
| 6. Ketua RT | : 5 orang |
| 7. <u>Masyarakat</u> | : <u>25 orang</u> |
| Jumlah | : 53 orang |

D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu :

- Data Primer adalah metode pengumpulan data yang diperoleh di lapangan dengan jalan pengamatan, wawancara langsung secara bertatap muka untuk memperoleh data akurat di lapangan sesuai masalah penelitian.
- Data Sekunder adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh melalui kepustakaan, referensi-referensi, buku-buku atau majalah / koran yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini teknik yang penulis gunakan dalam menjangkau data adalah melalui pengamatan, wawancara dan angket / kuisioner yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. *Observasi* (pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan langsung pada obyek penelitian. Baik pengamatan yang dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi rekayasa.

b. Interview (wawancara)

Wawancara adalah salah satu cara yang digunakan penelitian untuk memperoleh informasi atau keterangan lisan melalui tatap muka dengan pernyataan langsung kepada responden.

c. Kuesioner (daftar pertanyaan)

Kuesioner adalah sebagai suatu daftar pertanyaan untuk memperoleh data berupa jawaban dari pada responden.

E. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. **Editing (Mengedit)** yaitu tahap pemeriksaan kembali atas data yang telah dikumpulkan sehingga dapat diketahui data yang diperoleh atau diambil tidak kekurangan, kesalahan atau kekeliruan dalam file yang telah ada.
- b. **Coding (Pemberian Kode)** yaitu saat pengelompokan jawaban responden dan memberikan tanda, simbol, kode-kode tertentu untuk mempermudah proses pengolahan data.
- c. **Tabulating (tabulasi)** pada tahap ini penulis mengkategorikan jawaban-jawaban responden dengan menempatkan sesuai dengan proporsi masing – masing. Adapun data yang terkumpul dalam daftar pertanyaan atau kuesioner diolah kemudian dibuat dalam bentuk tabel dan berdasarkan frekuensi data ditafsirkan secara langsung dengan menggunakan persentase, menurut rumus *Anto Dayan (1973)* adalah sebagai berikut :

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

f = Frekuensi

n = Jumlah responden

100% = Angka konstanta

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan setelah mengumpulkan data dari lokasi penelitian kemudian data tersebut di atas diolah dan dianalisa data kuantitatif dan kualitatif.

Analisa kualitatif digunakan untuk menginterpretasikan data dalam bentuk kata atau kalimat. Analisa kualitatif digunakan untuk menginterpretasikan data dalam bentuk angka

PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah (Variabel Bebas)

1. Sosialisasi

Tabel 1

Distribusi Jawaban responden tentang pemerintah sering melakukan sosialisasi sebagai informasi kepada masyarakat

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sering	12	24,00
2	Kadang-kadang	36	67,92
3	Tidak pernah	5	8,08
Jumlah		53	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada Tabel 1 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang pemerintah sering melakukan sosialisasi sebagai informasi kepada masyarakat menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban kadang-kadang dengan jumlah responden sebanyak 36 orang (67,92%) hal ini membuktikan bahwa pemerintah kadang-kadang melakukan sosialisasi sebagai informasi kepada masyarakat. Salah satu tugas pemerintah kampung adalah menyampaikan informasi program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga dapat diketahui oleh seluruh masyarakat

Tabel 2
Distribusi Jawaban responden tentang sosialisasi yang diberikan bermanfaat kepada masyarakat

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Bermanfaat	10	18,87
2	Kurang bermanfaat	34	64,15
3	Tidak bermanfaat	9	16,98
Jumlah		53	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada Tabel 2 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang sosialisasi yang diberikan bermanfaat kepada masyarakat menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban kurang bermanfaat dengan jumlah responden sebanyak 34 orang (64,15%) hal ini membuktikan bahwa sosialisasi yang diberikan bermanfaat kepada masyarakat. Sosialisasi program pembangunan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat apabila dilakukan secara terus - menerus dengan transparan dan terbuka

Tabel 3
Distribusi Jawaban responden tentang masyarakat paham terhadap sosialisasi yang diberikan pihak pemerintah kampung

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Paham	8	15,09
2	Kurang paham	15	28,30
3	Tidak paham	30	56,61
Jumlah		53	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada Tabel 3 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang masyarakat paham terhadap sosialisasi yang diberikan pihak pemerintah kampung menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban tidak paham dengan jumlah responden sebanyak 30 orang (56,51%) hal ini membuktikan bahwa masyarakat tidak paham terhadap sosialisasi yang diberikan pihak pemerintah kampung. Penyampaian informasi kepada masyarakat disampaikan dengan bahasa yang sederhana tapi jelas, agar mudah dipahami oleh masyarakat kampung.

2. Pelatihan

Tabel 4

Distribusi Jawaban responden tentang masyarakat selalu diikuti sertakan dalam pelatihan-pelatihan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	17	32,07
2	Kadang-kadang	29	54,72
3	Tidak pernah	7	13,21
Jumlah		53	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 4.4 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang masyarakat selalu diikuti sertakan dalam pelatihan-pelatihan menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban kadang-kadang dengan jumlah responden sebanyak 29 orang (54,72%) hal ini membuktikan bahwa masyarakat hanya kadang-kadang diikuti sertakan dalam pelatihan-pelatihan, Meningkatkan kemampuan masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan-pelatihan sesuai kebutuhan dan berkelanjutan, supaya kerampilan yang dimiliki masyarakat semakin meningkat.

Tabel 5

Distribusi Jawaban responden tentang pelatihan yang diberikan mampu diterapkan oleh masyarakat

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mampu	5	9,43
2	Kurang mampu	19	35,85
3	Tidak mampu	29	54,72
Jumlah		53	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada Tabel 5 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang pelatihan yang diberikan mampu diterapkan oleh masyarakat menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban tidak mampu dengan jumlah responden sebanyak 29 orang (54,72%) hal ini membuktikan bahwa pelatihan yang diberikan tidak mampu diterapkan oleh masyarakat. Agar pelatihan mampu diterapkan oleh masyarakat kampung, pelatihannya harus menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipahami.

Tabel 6
Distribusi Jawaban responden tentang masyarakat mampu menerima pelatihan yang diikutinya

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Pernah	9	16,98
2	Kadang-kadang	32	60,38
3	Tidak pernah	12	22,64
Jumlah		53	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada Tabel 6 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang masyarakat mampu menerima pelatihan yang diikutinya menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban kadang-kadang dengan jumlah responden sebanyak 32 orang (60,38%) hal ini membuktikan bahwa masyarakat kadang-kadang mampu menerima pelatihan yang diikutinya. Keterbatasan pengetahuan seringkali mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengikuti program-program pelatihan yang dilakukan, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah meningkatkan pengetahuan masyarakat sebelum melaksanakan pelatihan.

3. Pengawasan

Tabel 7
Distribusi Jawaban responden tentang pihak aparat kampung selalu melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang ada di Kampung

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	10	18,87
2	Kadang-kadang	35	66,04
3	Tidak pernah	8	15,08
Jumlah		53	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada Tabel 7 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang pihak aparat kampung selalu melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang ada di Kampung menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban kadang-kadang dengan jumlah responden sebanyak 35 orang (66,04%) hal ini membuktikan bahwa pihak aparat kampung hanya kadang-kadang melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang ada di Kampung. Program ataupun

kegiatan dapat dilaksanakan, bila pengawasan dilakukan secara rutin dan sungguh-sungguh dan menerapkan sanksi tegas apabila kegiatan tidak sesuai tujuan.

Tabel 8

Distribusi Jawaban responden tentang pengawasan yang dilakukan selalu memiliki laporan pertanggungjawaban

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	12	22,64
2	Kadang-kadang	31	58,49
3	Tidak pernah	10	18,87
Jumlah		53	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada Tabel 8 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang pengawasan yang dilakukan selalu memiliki laporan pertanggungjawaban menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban kadang-kadang dengan jumlah responden sebanyak 31 orang (58,49%) hal ini membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan hanya kadang-kadang memiliki laporan pertanggungjawaban. Sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan tata pemerintahan yang baik dan transparan setiap kegiatan pengawasan atau apapun harus ada pelaporan dan diketahui oleh seluruh masyarakat kampung.

Tabel 9

Distribusi Jawaban responden tentang pengawasan selalu rutin dilakukan oleh pihak aparat kampung

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	11	20,75
2	Kadang-kadang	32	60,38
3	Tidak pernah	10	18,87
Jumlah		53	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada Tabel 9 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang pengawasan selalu rutin dilakukan oleh pihak aparat kampung menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban kadang-kadang dengan jumlah responden sebanyak 32 orang (60,38%) hal ini membuktikan bahwa pengawasan kadang-kadang dilakukan oleh pihak aparat Kampung. Pengawasan dilakukan tidak hanya sebagai rutinitas saja, tetapi harus

dilakukan demi kemajuan dan terlaksananya program-program yang dilaksanakan telah sesuai dengan perencanaannya.

B. Pembinaan Masyarakat (Variabel Terikat)
1. Bidang Ekonomi

Tabel 10
 Distribusi Jawaban responden tentang pembinaan yang diperoleh mampu berpengaruh terhadap ekonomi keluarga

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mampu	32	60,38
2	Kurang mampu	12	22,64
3	Tidak mampu	9	16,98
Jumlah		53	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada Tabel 10 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang pembinaan yang diperoleh mampu berpengaruh terhadap ekonomi keluarga menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban mampu dengan jumlah responden sebanyak 32 orang (60,38%) hal ini membuktikan bahwa pembinaan yang diperoleh mampu berpengaruh terhadap ekonomi keluarga. Pembangunan ekonomi masyarakat Kampung dapat bertumbuh dan berkembang apabila program-program pembinaan dilaksanakan secara berkelanjutan dan terencana serta terprogram sesuai kebutuhan masyarakat.

Tabel 11
 Distribusi Jawaban responden tentang masyarakat perlu mendapatkan modal usaha dalam menunjang pembinaan di bidang ekonomi

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Perlu	39	73,58
2	Kurang perlu	8	15,09
3	Tidak perlu	6	11,33
Jumlah		53	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada Tabel 11 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang masyarakat perlu mendapatkan modal usaha dalam menunjang pembinaan di bidang ekonomi menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban perlu dengan jumlah responden sebanyak 39 orang (73,58%) hal ini membuktikan bahwa masyarakat perlu mendapatkan modal usaha dalam

menunjang pembinaan di bidang ekonomi. Terbatasnya modal usaha masyarakat seringkali menjadi penghambat masyarakat dalam upaya meningkatkan roda perekonomian, untuk itu pemerintah kampung perlu memperhatikan kebutuhan dana yang diperlukan masyarakat untuk menggerakkan roda perekonomiannya.

Tabel 12
Distribusi Jawaban responden tentang pembinaan yang diberikan mampu diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupannya

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mampu	12	22,64
2	Kurang mampu	36	67,92
3	Tidak mampu	5	9,44
Jumlah		53	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada Tabel 12 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang pembinaan yang diberikan mampu diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupannya menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban kurang mampu dengan jumlah responden sebanyak 36 orang (67,92%) hal ini membuktikan bahwa pembinaan yang diberikan kurang mampu diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupannya. Pembinaan-pembinaan yang dilakukan harus mampu diterapkan oleh masyarakat Kampung, dengan memberikan masukkan-masukan yang sederhana dan tepat guna.

2. Bidang Sosial

Tabel 13
Distribusi Jawaban responden tentang masyarakat dan aparat kampung selalu bersama – sama dalam melakukan bakti sosial di lingkungan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	11	20,75
2	Kadang-kadang	32	60,38
3	Tidak pernah	10	18,87
Jumlah		53	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada Tabel 13 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang masyarakat dan aparat kampung selalu bersama – sama dalam melakukan bakti sosial di lingkungan menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban kadang-kadang dengan jumlah responden sebanyak

32 orang (60,38%) hal ini membuktikan bahwa masyarakat dan aparat kampung hanya kadang-kadang bersama – sama dalam melakukan bakti sosial di lingkungan. Untuk meningkatkan tali kebersamaan bakti sosial harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan bersifat sementara, sehingga rasa kebersamaan akan tercipta.

Tabel 14
Distribusi Jawaban responden tentang masyarakat selalu memiliki jiwa kebersamaan saling membantu ke sesama

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	37	69,81
2	Kadang-kadang	12	22,64
3	Tidak pernah	4	7,55
Jumlah		53	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada Tabel 14 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang masyarakat selalu memiliki jiwa kebersamaan saling membantu ke sesama menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban selalu dengan jumlah responden sebanyak 37 orang (69,81%) hal ini membuktikan bahwa masyarakat selalu memiliki jiwa kebersamaan saling membantu kesesama. Kebersamaan dapat tercapai apabila aparat dan masyarakat kanpung saling bekerjasama dalam segala hal untuk membangun saling pengertian dan saling percaya.

Tabel 15
Distribusi Jawaban responden tentang masyarakat pembinaan bidang sosial mampu memberikan dampak kepada masyarakat dalam bersosialisasi dengan masyarakat lainnya

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mampu	13	24,53
2	Kurang mampu	30	56,60
3	Tidak mampu	10	18,87
Jumlah		53	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada Tabel 15 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang masyarakat pembinaan bidang sosial mampu memberikan dampak kepada masyarakat dalam bersosialisasi dengan masyarakat lainnya menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban kurang

mampu dengan jumlah responden sebanyak 30 orang (56,60%) hal ini membuktikan bahwa masyarakat pembinaan bidang sosial kurang mampu memberikan dampak kepada masyarakat dalam bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. dengan dilakukan kegiatan bakti sosial akan memiliki dampak dimana masyarakat satu dengan yang lainnya saling mengenal, sehingga mempermudah sosialisasi antar masyarakat.

3. Bidang Agama

Tabel 16
Distribusi Jawaban responden tentang masyarakat diberikan pelatihan tentang akhlak

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Diberikan	13	24,53
2	Kadang-kadang	36	67,92
3	Tidak pernah	4	7,55
Jumlah		53	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada Tabel 16 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang masyarakat diberikan pelatihan tentang akhlak menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban kadang-kadang dengan jumlah responden sebanyak 36 orang (67,92%) hal ini membuktikan bahwa masyarakat hanya kadang-kadang pelatihan tentang akhlak. Pengetahuan akan Agama akan mempengaruhi watak maupun akhlak masyarakat dalam kehidupannya. Untuk itu pemerintah kampung secara rutin melakukan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh agama yang ada.

Tabel 17
Distribusi Jawaban responden tentang pembinaan keagamaan mampu memupuk saling bertoleransi dengan sesama

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mampu	30	56,60
2	Kurang mampu	15	28,30
3	Tidak mampu	8	15,10
Jumlah		53	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 4.17 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang pembinaan keagamaan mampu memupuk saling bertoleransi dengan sesama menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban mampu dengan jumlah responden sebanyak 30 orang (56,60%) hal ini membuktikan bahwa pembinaan keagamaan mampu memupuk saling bertoleransi dengan sesama. Untuk menghindari intolenrasi antar masyarakat, pemerintah perlu melakukan pendekatan-pendekatan Agama melalui tokoh-tokoh yang didengar oleh masyarakat Kampung, sehingga tercipta harmonisasi antar umat beragama.

Tabel 18
Distribusi Jawaban responden tentang pembinaan keagamaan perlu untuk masyarakat

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Perlu	36	67,92
2	Kurang perlu	10	18,87
3	Tidak perlu	7	13,21
Jumlah		53	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada Tabel 18 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang pembinaan keagamaan perlu untuk masyarakat menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban perlu dengan jumlah responden sebanyak 36 orang (67,92%) hal ini membuktikan bahwa pembinaan keagamaan perlu untuk masyarakat. Pembinaan keagamaan melalui ibadah sesuai agama yang dianut perlu dilakukan oleh pemerintah Kampung dengan melibatkan seluruh potensi yang ada dimasyarakat, agar tercipta rasa kebersamaan dan saling membutuhkan sehingga mempermudah pemerintah dalam menggerakkan pembangunan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Sosialisasi oleh Kampung Kalisemen kepada masyarakat, kurang dilakukan sehingga program-program tidak diketahui oleh masyarakat.
2. Pelatihan Masyarakat Kampung Kalisemen tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Pengawasan aparat pemerintah Kalisemen tidak rutin dilakukan yang menyebabkan pertanggungjawaban kurang jelas.
4. Masyarakat Kampung kalisemen kurang diberdayakan dibidang ekonomi, sosial, dan keagamaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Aparatur kampung bersama dinas terkait terjun langsung kelapangan untuk mensosialisasikan secara terus menerus kepada masyarakat akan program-program kampung yang sedang dan akan dilaksanakan serta memberikan transparansi penggunaan dana bagi pembangunan kampung.
2. Masyarakat harus ikut mengawasi jalannya pengelolaan dan penggunaan dana serta berpartisipasi aktif dalam penanggulangan kemiskinan.
3. Aparat kampung harus selalu melakukan pengawasan pada setiap kegiatan yang dilakukan di Kampung Kalisemen.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, *Membangun Desa Partisipatif*, Graha Ilmu Graha Ilmu. Yogyakarta, 2006
- Anto Dajan, *Metode Penelitian Survey*, Balai Pustaka, Jakarta, 1973
- Bayu Suryaningrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Bina aksara, Jakarta, 1980
- Gouzali Saydam, *Manajemen dan Bawahan*, Djambatan, Jakarta, 1996
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University, Jakarta 2001
- Hardjosoemantri, K, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1986
- Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*, Penerbit Erlangga: Jakarta, 2006
- Minor M, *Coaching and Counseling (terjemahan)*, PPM, Jakarta, 2002
- Mondong, Hendra, *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*, USU, Medan, 2011
- Munir, Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Siagian, Sondang, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 1979
- Sugiyono, *Pengantar Statistik*, Penerbit BPFE UGM, Yogyakarta, 2001
- Thoha M, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Toit, A. D, *Making sense through coaching*. Journal of Management Development, Volume 26, No. 3, 2007
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
- Widjaja, HAW, *Otonomi Desa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1993